

BAB II

SEJARAH PEREKONOMIAN AUSTRALIA

Australia mengalami reformasi ekonomi yang terjadi selama tiga dekade. Bab ini mengulas sejarah Australia yang didalamnya juga mencakup lebih detail reformasi ekonomi di Australia. Reformasi tersebut berdampak pada perekonomian Australia di masa krisis keuangan global.

A. Australia Dalam Perspektif Sejarah

Australia resmi menjadi negara persemakmuran pada 1 Januari 1901 melalui sebuah proklamasi yang dikeluarkan oleh kerajaan Inggris di tahun 1900. Umumnya persemakmuran ini dikenal dengan nama *Commonwealth of Australia* dan terbagi menjadi 6 wilayah bagian. Keenam wilayah tersebut adalah New South Wales, Victoria, Queensland, Northern Territory, Australia Selatan, dan Australia Barat.

Sebelum menjadi sebuah negara persemakmuran di tahun 1901, keenam wilayah tersebut memiliki pemerintahan masing-masing. Hingga kemudian sebuah gagasan untuk menyatukan keenam wilayah tersebut muncul. Meski demikian, proses menuju terbentuknya negara persemakmuran ini tidak terjadi secara mendadak. Setidaknya terdapat dua buah konvensi yang dilakukan. Konvensi pertama diadakan di Sydney pada tahun 1891. Konvensi ini mengemban tugas untuk menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia, kemudian menyampaikannya kepada

setiap koloni untuk mendapatkan pengesahan (Siboro, 2002). Konvensi kedua dilakukan pada tahun 1897-1898 dihadiri oleh wakil-wakil dari koloni-koloni yang ada. Dalam konvensi kedua ini dibahas mengenai sistem pemerintahan yang akan mereka anut. Pada saat itu, contoh pemerintahan yang diambil adalah Amerika dan Kanada. Meskipun akhirnya Australia tidak mengambil salah satu dari kedua sistem pemerintahan tersebut, melainkan menggabungkan keduanya (Siboro, 2002).

Setelah melalui dua konvensi akhirnya muncul sebuah referendum yang ditanggapi oleh pemerintahan Inggris dengan mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengesahkan konstitusi Australia. Undang-undang tersebut dikeluarkan pada bulan Juli 1900, kemudian proklamasi dilakukan oleh kerajaan Inggris pada 17 September 1900, dan pemerintahan Australia baru sah berjalan pada 1 Januari 1901 (Siboro, 2002).

Inggris memang memiliki peran yang sangat besar bagi negara Australia. Kedekatan Australia dan Inggris dapat dilihat dalam sejarah, terutama di masa kolonialisme. Australia terletak di wilayah Asia Pasifik. Meski begitu, masa kolonialisme di Australia berbeda dengan negara-negara di sekitarnya. Australia tidak mengalami apa yang dialami sebagian besar wilayah di Asia Pasifik pada masa kolonialisme. Umumnya, negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengalami masa-masa sulit dan muncul pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan. Seperti di Indonesia yang dijajah Belanda dan Jepang, serta Filipina yang dijajah Spanyol.

Michael Wesley dalam tulisanya berjudul *Nationalism and Globalization in Australia* mengatakan:

Until 1942, Australia had no realistic external foe to foster nationalism out of the desperate struggle for defense. Neither was a unifying independence struggle against the colonial center necessary (Wesley, 2002).

Hal tersebut terjadi karena Australia memiliki hubungan istimewa dengan negara-negara di Eropa, terutama dengan Inggris. Warga Australia merupakan pendatang dari Eropa. Bahkan kedekatan hubungan antara Australia dan Inggris di masa-masa awal sedikit memberikan bias untuk menentukan masalah sosial dan geografi bagi warga Australia. Sebagian besar pendatang memang berasal dari Inggris, namun terdapat pula orang-orang dari wilayah lain Eropa. Di masa awal kedatangannya, terdapat orang-orang Skotlandia dan orang-orang katolik Irlandia. Setelahnya, berdatangan pula orang-orang Jerman, Italia, Eropa Tengah dan Eropa Selatan (Wesley, 2002).

Karena kedekatan hubungan tersebut, Australia masih merasa menjadi bagian dari Inggris. Bahkan pada saat Inggris memasuki perang Eropa, pemimpin Australia secara otomatis berpihak pada Inggris (Wesley, 2002). Hal tersebut kemudian menimbulkan sedikit kontroversi di dalam masyarakat Australia.

Apa yang dialami Australia kemudian menjadikan semangat nasionalisme warga Australia dan warga negara lain di wilayah Asia Pasifik berbeda. Jika negara-negara di wilayah Asia Pasifik memiliki persamaan nasib sehingga persatuan mereka terjadi didasarkan atas kesamaan suku, adat,

dan masa lalu, maka bentuk nasionalisme Australia lebih berdasarkan pada semangat juang bersama untuk masa depan.

Dari sinilah kemudian Australia dapat dengan mudah menyesuaikan zaman. Hal-hal seperti pembuatan regulasi yang dirasa lebih sesuai dengan warga Australia seringkali dilakukan. Seperti misalnya pembuatan pilar *Australian Settlement* di masa-masa awal federasi terbentuk yang didalamnya terkandung hal-hal seperti *White Australia*, *Industry Protection*, *Wage Arbitration*, *State Paternalism*, dan *Imperial Benevolence* (Wesley, 2002). Hal tersebut dilakukan sebagai mekanisme bertahan Australia menyesuaikan globalisasi yang bisa saja mengancam kondisi tenang Australia pada saat itu.

Penyesuaian lebih sering dilakukan, terlebih ketika globalisasi mulai menyebar. Kembali mengutip Michael Wesley, ia menuliskan:

The demands of globalization have imposed on Australia the choice between defense and adjustment, and the mix between reliance on traditional structures and innovation to supplement these structures or take advantage of new situations has in turn influenced developments in Australian national identity (Wesley, 2002).

Penyesuaian ini pun terjadi di ranah ekonomi. Pada tahun 1930, ketika Australia mengalami depresi ekonomi, pemimpin Australia menanggapi dengan melakukan beberapa inovasi seperti mengembangkan *welfare state* yang kemudian digabungkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Australia.

Tahun 1970-an menjadi periode penting bagi perkembangan Australia. Beberapa perubahan di ranah internasional terjadi disebabkan oleh globalisasi dan mempengaruhi keadaan dalam negeri Australia. Meski perubahan-perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi keadaan Australia secara

signifikan seperti yang dilakukan oleh *The Great Depression* dan Perang Dunia II, namun perubahan-perubahan ini cukup serius karena terjadi secara serempak hingga mempengaruhi identitas nasional Australia.

Dimulai pada tahun 1969, Amerika mengeluarkan kebijakan bernama *Nixon Doctrine* yang kemudian menyebabkan adanya periode panjang ketidak pastian di wilayah Asia Pasifik. Kemudian pada tahun 1973 Inggris bergabung dengan *European Economic Community* (EEC). Tahun 1974, perekonomian Australia yang diprediksi akan terus bertumbuh mengalami stagnasi bahkan inflasi pada saat itu sangat tinggi.

Tahun 1970-an dapat dikatakan sebagai ujian besar bagi Australia. Memberikan tantangan bagi Australia menghadapi dunia internasional. Periode tersebut juga dipandang sebagai revolusi industri ketiga. Di mana ekonomi global berubah selamanya, ditandai dengan 3 hal yang berkesinambungan yaitu meningkatnya produksi dan perdagangan internasional; teknologi canggih yang mempengaruhi informasi dan komunikasi, proses produksi, organisasi, dan pasar keuangan; dan berakhirnya Perang Dingin yang menyebabkan penyebaran liberalisasi pasar di hampir seluruh dunia.

Hal ini mempengaruhi keadaan dalam negeri Australia, seperti yang dituliskan Michael Wesley:

These Changes, taken together, profoundly challenged the pillars of the Australian identity. The Nixon Doctrine, Britain entering the EEC, and the raise of East Asia, collectively challenged Australia's sense of security and place in the world. The world economic downturn and the onset of stagflation questioned the future of the easy, egalitarian prosperity of Australian society, while the acceleration of the Third Industrial Revolution seemed to suggest

that Australia could no longer rely on its traditional products and markets to guarantee its prosperity (Wesley, 2002).

B. Reformasi Ekonomi Australia

Setelah melewati periode yang penuh tantangan dari dunia internasional di tahun 1970-an hingga membuat tingkat inflasi dan pengangguran di Australia tinggi, maka tahun 1980-an dan setelahnya menjadi periode progresif bagi Australia.

Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan politik ekonomi di dalam negeri. Phillip O'Neill dan Bob Fagan dalam tulisannya berjudul *Geographical Takes on Three Decades of Economic Reform in Australia* (O'Neill & Fagan, 2006) membagi periode perubahan Australia ke dalam tiga bagian.

1. *Period 1 (the 1970s and early 1980s): the end of the protected Australian Keynesian State*

Periode pertama yaitu dimulai akhir tahun 1970 hingga awal 1980 atau yang ia katakan sebagai *The End of the Protected Australian Keynesian State*. Dimulai pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam, dimana pemerintahannya memiliki agenda reformasi sosial, meningkatkan layanan pemerintah, sektor publik yang lebih responsif, dan juga pengagendaaan belanja pemerintah yang ditingkatkan.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Whitlam memang memberi peningkatan ekonomi bagi Australia, namun hal tersebut tak bertahan lama karena di tahun-tahun tersebut secara bersamaan terjadi krisis ekonomi di ranah internasional. Tingkat inflasi di Australia pada saat

itu meningkat drastis karena anggaran belanja pemerintah yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran malah gagal.

Malcolm Fraser, sebagai pengganti Gough Whitlam kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi saat itu meski tak sepenuhnya berhasil. Mengutip Phillip O'Neill dan Bob Fagan, mereka mengatakan:

The Fraser Coalition government (1975-1983) applied the fiscal brakes and initiated strident attacks on organized labor to restore capital's share of factor income, but failed to generate economic reform, and the nation's economic malaise deepened (O'Neill & Fagan, 2006).

2. Period 2 (the 1980s and early 1990s): State-engineered market liberalization

Periode ini merupakan periode dimana Australia dipimpin oleh Bob Hawke dan Paul Keating dari Partai Buruh. Kepemimpinan dua Perdana Menteri ini juga dikenal sebagai *Hawke-Keating Government* karena selain berasal dari partai yang sama, program dari pemerintahan Bob Hawke tidak sedikit yang merupakan ide dari Paul Keating. Pada periode ini pemerintah melakukan banyak perubahan ekonomi dan dikatakan sebagai asal mula reformasi ekonomi karena dimulai pada periode ini pemerintah dengan kebijakannya konsisten mengarahkan negara kepada pencapaian-pencapaian ekonomi (Quiggin, 1996).

Dimulai di tahun 1983 yaitu tahun dimana Bob Hawke terpilih menjadi Perdana Menteri. Bob Hawke mewarisi masalah ekonomi dari pemerintahan sebelumnya berupa stagflasi, yaitu keadaan dimana tingkat inflasi tinggi disertai tingkat pengangguran yang juga tinggi.

Tidak berselang lama setelah resmi menjabat, pemerintahan Bob Hawke menggelar konferensi yang dikenal dengan nama *National Economic Summit*. Konferensi tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan para *stakeholder* yang berperan penting atas perekonomian Australia agar tercipta satu pemahaman tentang upaya pemerintah dalam membereskan keadaan ekonomi (Wright & Lansbury, 2014). Dalam konferensi tersebut, Bob Hawke menjelaskan persetujuan yang telah dilakukan oleh pemerintahannya dengan *Australian Council of Trade Union (ACTU)* berupa pembuatan perjanjian yang dinamai *Prices and Incomes Accord (The Accord)*.

The Accord merupakan sebuah pencapaian penting karena tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah stagflasi, namun juga memfasilitasi adanya proses liberalisasi ekonomi dan modernisasi yang membantu membangun ekonomi Australia menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Mengutip Chris F. Wright dan Russell D. Lansbury, mereka menuliskan:

The Accord had wider significance for macroeconomic policy than simply controlling wage and price-led inflation. The Australian Labor Party governments of this period embarked upon sweeping economic reforms that went well beyond incomes and labor market policy. In order to improve Australia's economic performance in international markets, market regulations were liberalized extensively by floating the Australian dollar, deregulating financial markets and the banking sector, introducing a competition policy and privatizing public assets (Wright & Lansbury, 2014).

Adanya pemberlakuan sistem kurs mengambang dikarenakan pada Desember 1983 mata uang Australia berada di bawah spekulasi pasar uang. Jika pada era pemerintahan Whitlam hal ini diatasi dengan cara mengurangi kontrol pada arus modal, maka di pemerintahan Bob Hawke pemberlakuan kurs mengambang adalah yang dilakukan. Adanya perubahan sistem kurs dari yang sebelumnya tetap menjadi mengambang membantu Australia lebih

fleksibel dalam menghadapi tekanan ekonomi internasional. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis asia di tahun 1997 dan juga *dot-com bubble* yang terjadi pada tahun 1995-2001 dimana kurs Australia jatuh dan hal tersebut membantu mengisolasi keadaan ekonomi domestik (Battellino, *Twenty Years of Economic Growth*, 2010).

Kemudian reformasi ekonomi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan Hawke-Keating adalah privatisasi. Privatisasi adalah pengubahan status dari perusahaan milik pemerintah menjadi perusahaan yang dikelola oleh swasta. Beberapa perusahaan negara yang menjadi kepemilikan swasta adalah Commonwealth Bank of Australia, Qantas, Commonwealth Serum Laboratory, dan fasilitas *electricity generation* yang terletak di Victoria.

Selain reformasi ekonomi domestik, Perdana Menteri Bob Hawke juga melakukan manuver arah ekonomi dari yang sebelumnya berkiblat ke Eropa dan Amerika menjadi mengarah ke Asia. Keadaan ekonomi Asia yang dinamis pada saat itu mampu menarik perhatian pemimpin dunia. Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea Selatan pada 31 Januari 1989 membuka pembicaraan terkait ide pembentukan APEC, yaitu sebuah kerjasama multilateral di bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sepuluh bulan setelahnya, 12 negara bertemu di Canberra, Australia. Negara-negara tersebut adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat yang merupakan anggota awal APEC.

Sebenarnya pada tahun 1972 Perdana Menteri Gough Whitlam telah lebih dahulu memulai hubungan dengan salah satu negara di wilayah Asia, yaitu Cina. Kemudian pada era kepemimpinan Malcolm Fraser, Australia semakin mendekati diri dengan Cina. Salah satu alasannya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan besar Uni Soviet, namun Fraser juga melihat potensi lain berupa kesempatan di bidang ekonomi. Apalagi pada saat itu muncul gerakan modernisasi dari pemimpin baru China, Deng Xiaoping. Akan tetapi, dengan terciptanya APEC, semakin mempertegas arah ekonomi Australia dan bahwa Asia adalah wilayah yang penting bagi Australia.

Hubungan bilateral Australia dengan China semakin kuat, terlebih setelah China pada tahun 1991 bergabung menjadi anggota APEC. Australia menjadikan negara-negara anggota APEC sebagai pasar utama. Pada laporan tahunan di tahun 2001, Biro Statistik Australia mempertegas pernyataan tersebut seperti pada kutipan berikut:

By 1999-2000 the balance of Australia's trading relationship had changed significantly. Our trade focus is now firmly on the members of the Asia Pacific Economic Cooperation forum (APEC). Nine of Australia's ten major trading partners are member of APEC, the UK now ranks sixth (Australian Bureau of Statistics, 2001).

Hingga saat ini hal tersebut masih konsisten dilakukan. Dari sepuluh besar partner dagang Australia saat ini, enam diantaranya merupakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. China menempati urutan nomor satu dengan komoditas terbesar yang diekspor adalah emas, batu bara, dan bijih besi.

Pada tahun 1991 kepemimpinan Bob Hawke berakhir dan digantikan oleh Paul Keating, yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara negara. Perjalanan Paul Keating dimulai pada tahun 1969, yaitu pada saat ia berhasil

memenangkan kursi DPR di Blaxland. Ia memasuki parlemen di usia 25 tahun dan menjadi anggota parlemen termuda (National Archives of Australia, 2016).

Paul Keating merupakan arsitek sistem ekonomi Australia yang diciptakan pada masa kepemimpinan Bob Hawke. Ia yang menginisiasi adanya perubahan-perubahan ekonomi seperti privatisasi, menetapkan kurs mengambang, dan deregulasi di beberapa bidang. Paul Keating dikatakan sebagai salah satu bendahara negara terbaik. Richard Holden dalam artikelnya yang dimuat pada media berita online ABC menjelaskan bagaimana Paul Keating dapat dikatakan sebagai bendahara terbaik. Ia menuliskan:

It's tempting to think that good economic instincts are the key. And Keating had great economic instincts. He had an intuitive grasp of the importance of market-oriented economic policy, particularly for a small open economy like Australia. He understood that a strong social safety net could only be sustained on the back of a strong economy. And he realized that heavy regulation and high tariffs benefited capital and hurt workers (Holden, 2013).

Pada saat Paul Keating terpilih menjadi Perdana Menteri, Australia berada dalam resesi. 8 kuartal berturut-turut perekonomian Australia terus menurun. Kemudian pada akhir tahun 1992, Paul Keating mengeluarkan sebuah program ekonomi bernama *One Nation* yang bertujuan untuk menciptakan 800.000 lapangan pekerjaan hingga tahun 1996. Setelah jumlah pengangguran mulai menurun pada tahun pertama kepemimpinannya, pemerintahan Paul Keating kemudian merespon dengan *Australian National Training Authority Act 1992*, yaitu sebuah upaya koordinasi antar agensi untuk melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja (National Archives of Australia, 2016).

Hubungan dengan negara-negara Asia Pasifik pun semakin diupayakan oleh Paul Keating untuk lebih dekat. Hal ini sesuai dengan pandangan tentang gambaran dirinya tentang Australia sebagai *republic of equal citizen* (National Archives of Australia, 2016). Australia berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan Inggris dan ketergantungan yang selama ini dimiliki Australia.

Meski Paul Keating berhasil memenangkan pemilu di tahun 1993, namun kepemimpinannya di periode kedua tersebut mengalami beberapa masalah. Pada periode keduanya, ia kehilangan 4 anggota kabinet. John Dawkins mengundurkan diri dari jabatan sebagai bendahara negara di tahun 1993, dan secara tidak terduga disusul oleh pengunduran diri Graham Richardson dan Ros Kelly pada Maret 1994 (National Archives of Australia, 2016). Pada pemilu selanjutnya, partai Buruh dikalahkan oleh koalisi partai Liberal dan partai National yang berhasil mendapatkan 40 kursi di parlemen.

3. *Period 3 (the 1990s onwards): neoliberalism*

John Howard terpilih menjadi Perdana Menteri Australia di tahun 1996. Ia berhasil menjadi Perdana Menteri dari koalisi partai Buruh dan partai Nasional yang memenangkan pemilu tahun 1996, mengalahkan Paul Keating. Ia menjadi Perdana Menteri Australia kedua yang memiliki masa jabatan sangat panjang setelah Robert Menzies. Masa kepemimpinannya ini dipandang sebagai kepemimpinan dengan neoliberalisme sebagai ideologi utama (O'Neill & Fagan, 2006).

Relasi antara ACTU dan pemerintah yang pada masa kepemimpinan Bob Hawke tercipta melalui *The Accord*, pada masa kepemimpinan John Howard diakhiri (Wright & Lansbury, 2014). Meski demikian, liberalisasi ekonomi masih terus dilakukan oleh pemerintahan John Howard. Salah satunya adalah ditandai dengan privatisasi Telstra.

Pada tahun pertama kepemimpinan John Howard, pemerintah menjual sepertiga saham perusahaan telekomunikasi Telstra. Dengan *The Telstra (Dilution of Public Ownership) Act 1996*, pemerintah berhasil menjual saham kepemilikan Telstra kepada publik dengan total penghasilan sebanyak \$1 miliar (Colston & Harradine, 2016). Hasil dari penjualan saham tersebut kemudian dialokasikan pada program-program lingkungan hidup. Antara tahun 1996 dan 1999, saham Telstra terjual dua kali sebanyak 49%.

Kemudian pemerintah juga mengeluarkan undang-undang bernama *The Workplace Relations Act 1996* dan *Workplace Relations and Other Legislation Amendment Act 1997*. Dengan dua undang-undang tersebut, hubungan industrial (hubungan antara manajemen di perusahaan dan pekerja) mulai ditata ulang. Hal-hal yang diatur didalamnya termasuk tentang kualifikasi pekerja dan juga upah minimum pekerja.

Apa yang diupayakan oleh Bob Hawke dan Paul Keating pada pemerintahan sebelumnya yaitu memperkuat hubungan dengan Asia-Pasifik, masih juga dilakukan pada kepemimpinan Jon Howard. Politik luar negerinya yang mengatakan bahwa *Asia-first, but not asia only* menjadi bukti nyata dari upaya diplomasi tersebut. Politik luar negeri tersebut berusaha mengintegrasikan

beberapa kebijakan luar negeri yang dimiliki Australia di abad 20. Hal-hal yang dimaksudkan antara lain yaitu hubungan yang telah lama terjalin dengan Inggris dan Eropa, mengembangkan hubungan dengan negara-negara persemakmuran Inggris, melakukan kerjasama perdagangan dan militer dengan Amerika, dan juga hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik yang sudah terjalin sejak lama (Colston & Harradine, 2016).

C. Dampak Reformasi Ekonomi Australia

Adanya pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara dikarenakan oleh efisiensi dari kegiatan ekonomi. Efisiensi ini dapat diinterpretasikan melalui produktivitas, yaitu nilai sebuah *output* yang berhasil diproduksi dari nilai *input* tertentu. Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas sehingga mendapatkan perbandingan terbaik antara *output* dan *input*. Reformasi ekonomi mikro akan membantu meningkatkan kualitas *input* yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan produktivitas dalam ekonomi (Borland, 2001).

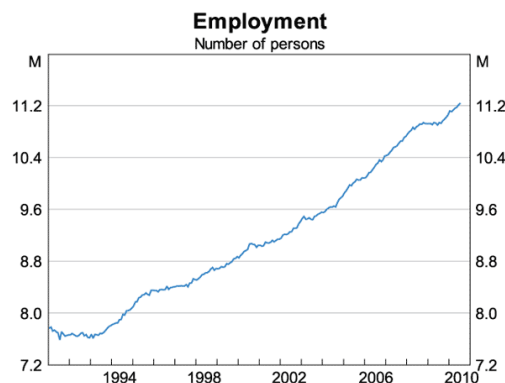
Reformasi yang terjadi di Australia selama kurang lebih tiga dekade membawa dampak kepada perekonomian Australia berupa pertumbuhan dalam periode yang lama. Setidaknya telah terjadi pertumbuhan dengan rata-rata 3.3% setiap tahunnya dari tahun 1991. Meski bukan menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan pertumbuhan tersebut, namun reformasi ekonomi Australia diakui berhasil oleh banyak pihak. Perekonomian Australia dalam 20 tahun terakhir memperlihatkan stabilitas dan juga fleksibilitas yang lebih

baik jika dibandingkan pada dekade 70 dan awal dekade 80, dimana ekonomi internasional juga mengalami banyak perubahan akibat globalisasi.

Fleksibilitas yang dimiliki oleh perekonomian Australia berhasil membawa Australia keluar dari beberapa permasalahan ekonomi internasional. Seperti krisis Asia dan gelembung ekonomi (*bubble*) dot-com. Pemberlakuan kurs mengambang (*floating exchange rate*) memegang peranan penting dalam hal ini. Ric Battellino, wakil ketua bank sentral Australia (*Reserve Bank of Australia*) periode 2007 – 2012 menuliskan:

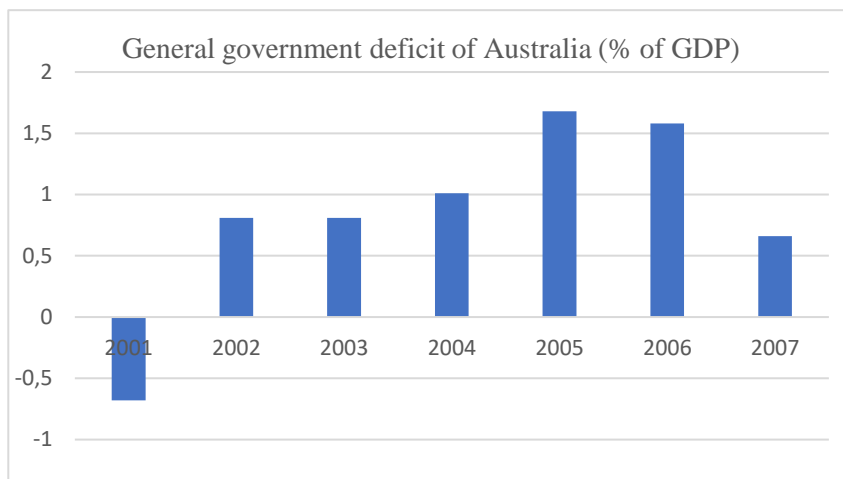
One of the key elements in that flexibility has been the floating exchange rate. The Australian dollar has played an important countercyclical role by rising and falling in response to various external events that otherwise might have had the potential to destabilise the domestic economy. This was evident both during the Asian crisis and the dot-com bubble, when the Australian dollar fell sharply in response to deteriorating economic conditions abroad, helping to insulate the domestic economy (Battellino, Twenty Years of Economic Growth, 2010).

Reformasi pada hal lain seperti pasar tenaga kerja, privatisasi, sistem keuangan, dan juga kebijakan industrial ikut pula berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Australia. Dengan tenaga kerja yang lebih berkualitas, perubahan dunia kerja tidak mengguncang tenaga kerja



Grafik 2. 1 pertumbuhan tenaga kerja Australia dari tahun 1991 – 2010
(Reserve Bank of Australia, 2010)

Australia yang kemudian menyebabkan banyak pengangguran. Sistem keuangan yang lebih baik pun membuat Australia lebih diminati oleh investor asing. Kemudian di ranah industrial, sektor bisnis lebih berorientasi pada dunia luar dan semakin kompetitif. Grafik 2.1 merupakan data pertumbuhan tenaga kerja sejak tahun 1991. Sebanyak 3,5 juta pekerjaan tercipta dan pendapatan rumah tangga meningkat (Battellino, *Twenty Years of Economic Growth*, 2010).



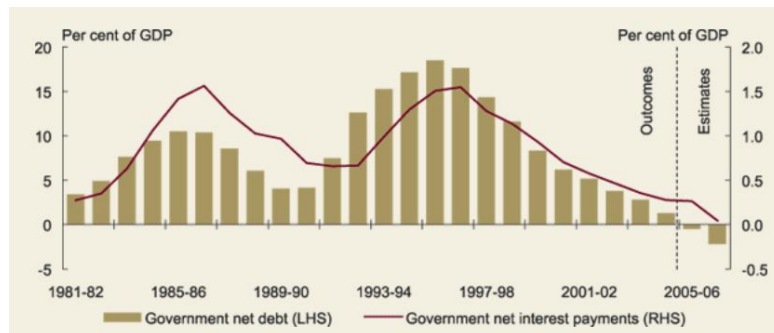
Grafik 2. 2 Data budget deficit pemerintah Australia dari tahun 2001 – 2007 (OECD, 2015)

Dikarenakan oleh performa ekonomi yang baik, surplus terjadi secara berturut-turut dari tahun 2002 – 2007 seperti yang terlihat pada grafik 2.2. Surplus adalah keadaan dimana pendapatan pemerintah lebih banyak dari pengeluaran. Dengan adanya surplus, pemerintah dapat melakukan alokasi dana untuk membayar utang negara.

Utang negara adalah akumulasi dari defisit anggaran pemerintah. Ketika pendapatan pemerintah (baik dari pajak maupun pendapatan bukan pajak) lebih sedikit dari pembelanjaan pemerintah, maka sebuah negara

dikatakan defisit. Jika di tahun setelahnya hal yang sama masih terjadi, maka anggaran yang defisit akan terakumulasi dan itulah utang negara.

Grafik 2.3 menunjukkan tingkat utang neto pemerintah. Utang neto pemerintah adalah nilai kewajiban yang harus dibayar pemerintah dikurangi nilai aset yang dimiliki pemerintah (OECD, 2014). Sehingga ketika surplus terus terjadi seperti yang dialami Australia, secara berkala utang neto pemerintah akan terus berkurang.



Grafik 2. 3 Perbandingan antara utang neto pemerintah dan pembayaran bunga neto (Australian Treasury, 2007)

Pada tahun 2005 – 2006 utang neto pemerintah berhasil terbayar. Utang tersebut terbayar lunas dalam pertama kali setelah 30 tahun, dengan titik tertinggi di tahun 1995 – 1996 yang mencapai angka 18.5% dari GDP.